

**REFORMULASI UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 7 TAHUN 1955 TERHADAP PERKEMBANGAN
TINDAK PIDANA EKONOMI**

ABSTRAK

Tindak Pidana Ekonomi berawal dari etika bisnis yang berkembang diluar kodifikasi KUHP serta merupakan tindak pidana dengan motif ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap banyak aspek seperti sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang mengatur tindak pidana ekonomi tidak ada pembaharuan dan telah dibiarkan. Berbagai jenis-jenis tindak pidana di bidang perekonomian yang termuat dalam UU. No.7/drt/1955 sudah diatur dalam undang-undangnya tersendiri. Tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara dan tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut. Perkembangan teknologi yang kian semakin canggih membuat *modus operandi* semakin baru dan menuntut diperlukannya pembaharuan pada peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Reformulasi terhadap UU. No.7/drt/1955 perlu dilakukan juga dengan menetapkan kebijakan sanksi yang efektif agar membuat kegiatan perekonomian menjadi kondusif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian akan membahas terkait perkembangan tindak pidana ekonomi yang ada di Indonesia saat ini dan reformulasi pada kebijakan sanksi serta menetapkan ruang lingkup dan istilah mengenai tindak pidana ekonomi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Perekonomian, Kebijakan Sanksi

**REFORMULATION OF EMERGENCY LEGISLATION
NUMBER 7 OF 1955 TOWARDS DEVELOPMENT
ECONOMIC CRIME**

ABSTRACT

Economic Crime originated from business ethics that developed outside the codification of the Criminal Code and is a criminal act with economic motives that has an influence on many aspects such as social, economic, political and cultural. Emergency Law Number 7 of 1955 which regulates economic crimes has not been renewed and has been left. Various types of criminal acts in the economic sector contained in the Law. No.7/drt/1955 has been regulated in its own law. Criminal acts in the economic sector are part of the economic law that applies in a country and cannot be separated from the economic system adopted by the nation. The development of increasingly sophisticated technology makes the modus operandi increasingly new and demands the need for updates to laws and regulations in the economic sector by conducting an inventory of laws and regulations related to economic crimes. Reformulation of the Law. No.7/drt/1955 also needs to be done by establishing effective sanctions policies in order to make economic activities conducive. This research uses normative juridical research methods using descriptive analysis techniques. The results of the study will discuss the development of economic crimes that exist in Indonesia today and reformulation of sanctions policies and determine the scope and terms of economic crimes.

Keywords: Economic Crime, Economy, Sanctions Policy